



Statistika Deskriptif Pada Analisis Ketimpangan Kemiskinan (Studi Kasus Data Kemiskinan Wilayah Perkotaan dan Pedesaan Seluruh Provinsi di Indonesia periode tahun 2021-2022)

Muhammad Nashif Farid¹, Mohammad Sufa Ammar Habibi², Trimono³

^{1, 2, 3}Program Studi Sains Data, Fakultas Ilmu Komputer, UPN “Veteran” Jawa Timur

¹22083010024@student.upnjatim.ac.id

²22083010014@student.upnjatim.ac.id

³trimono.stat@upnjatim.ac.id

Abstract: *The trend of poverty in Indonesia is a problem that requires special attention in its mitigation. This study discusses the inequality of poverty between urban and rural areas in Indonesia, based on data from the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik or BPS) for the period 2021-2022. The research employs descriptive analysis and Pearson correlation test as the methods. The results of the descriptive analysis indicate a significant difference between the regions. Furthermore, the results of the correlation test also demonstrate that the majority of poverty cases in Indonesia are concentrated in rural areas. Therefore, further research is needed*

Keyword : *Poverty, Inequality*

Abstrak: Trend masalah kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang perlu mempunyai perhatian khusus dalam penanggulangannya. Penelitian ini membahas ketimpangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan di Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan uji korelasi pearson. Hasil uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah. Kemudian hasil uji korelasi juga menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia sebagian besar terdapat dalam rentang wilayah pedesaan. Oleh karenanya diperlukan penelitian lebih lanjut dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan dengan memperhatikan faktor dan implikasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci : Kemiskinan, Ketimpangan, Analisis Deskriptif

I. PENDAHULUAN

Ketimpangan kemiskinan merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah perkembangan ekonomi dan modernisasi, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Fenomena ini melibatkan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, yang menghasilkan disparitas yang signifikan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan beragam budaya, etnis, dan geografi, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengatasi ketimpangan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun ada kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Ketimpangan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pengangguran, akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta perbedaan dalam distribusi infrastruktur dan sumber daya.

Pada artikel ini, penulis akan menganalisis tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data yang diperoleh dari BPS. Kami akan fokus pada perbandingan antara kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta melihat perbedaan kemiskinan antar provinsi di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ketimpangan kemiskinan di Indonesia dan merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

**Tabel 1.** Persentase Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia Tahun 2021 - 2022

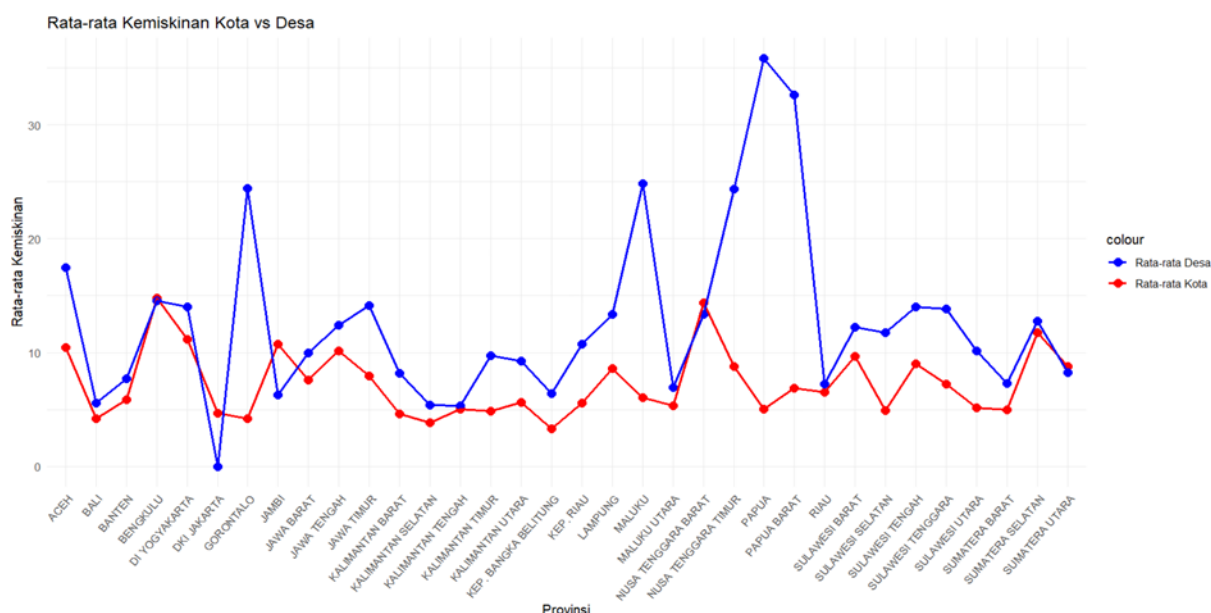
No	Provinsi	Rata-rata Kota	Rata-rata Desa	Rata-rata Keseluruhan
1	ACEH	10,425	17,4375	13,93125
2	SUMATERA UTARA	8,805	8,26	8,5325
3	SUMATERA BARAT	4,995	7,3	6,1475
4	RIAU	6,5175	7,2125	6,865
5	JAMBI	10,7525	6,3025	8,5275
6	SUMATERA SELATAN	11,7375	12,7525	12,245
7	BENGKULU	14,81	14,5725	14,69125
8	LAMPUNG	8,61	13,365	10,9875
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3,34	6,3975	4,86875
10	KEP. RIAU	5,5575	10,715	8,13625
11	DKI JAKARTA	4,6725	0,0000	4,6725
12	JAWA BARAT	7,5975	9,9625	8,78
13	JAWA TENGAH	10,17	12,4	11,285
14	DI YOGYAKARTA	11,1575	14,02	12,58875
15	JAWA TIMUR	7,965	14,1075	11,03625
16	BANTEN	5,8975	7,74	6,81875
17	BALI	4,2	5,5425	4,87125
18	NUSA TENGGARA BARAT	14,385	13,3475	13,86625
19	NUSA TENGGARA TIMUR	8,7525	24,3675	16,56
20	KALIMANTAN BARAT	4,6175	8,1875	6,4025
21	KALIMANTAN TENGAH	5,05	5,3225	5,18625
22	KALIMANTAN SELATAN	3,8425	5,3675	4,605
23	KALIMANTAN TIMUR	4,88	9,7125	7,29625
24	KALIMANTAN UTARA	5,6025	9,2575	7,43
25	SULAWESI UTARA	5,1575	10,1525	7,655
26	SULAWESI TENGAH	9,0325	14,025	11,52875
27	SULAWESI SELATAN	4,9275	11,76	8,34375
28	SULAWESI TENGGARA	7,2425	13,85	10,54625
29	GORONTALO	4,1875	24,4475	14,3175
30	SULAWESI BARAT	9,6575	12,225	10,94125
31	MALUKU	6,035	24,835	15,435
32	MALUKU UTARA	5,3275	6,925	6,12625
33	PAPUA BARAT	6,885	32,61	19,7475
34	PAPUA	5,04	35,82	20,43
Rata-rata Keseluruhan		7,29	12,66	9,97

Tabel 1 menampilkan persentase rata rata kemiskinan di Indonesia dan berbagai provinsi yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2021 – 2022. Indonesia memiliki persentase rata rata kemiskinan sebesar 9,972537 persen (sekitar 7,289191 persen dari perkotaan dan 12,65588 pedesaan). Provinsi Papua menjadi penyumbang persentase tertinggi kemiskinan di pedesaan, dengan persentase mencapai 35,82 persen. Sementara itu, provinsi Bengkulu merupakan penyumbang persentase tertinggi kemiskinan di perkotaan, dengan persentase sebesar 14,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi

Papua dan Bengkulu memiliki tantangan yang perlu ditangani dalam mengurangi tingkat kemiskinan, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Secara khusus, provinsi Papua memiliki persentase rata-rata kemiskinan terbesar, yaitu sebesar 20,43 persen. Hal ini terdiri dari persentase kemiskinan di pedesaan sebesar 35,82 persen dan persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 5,04 persen. Di sisi lain, provinsi DKI Jakarta memiliki persentase rata-rata kemiskinan terkecil, yaitu sebesar 2,33625 persen. Hal ini terdiri dari persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 4,6725 persen, sementara tidak ada persentase kemiskinan di pedesaan.

Perbedaan yang signifikan antara tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan di berbagai provinsi mengindikasikan adanya disparitas sosial dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam konteks ini, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ini. Faktor-faktor seperti akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar perlu dieksplorasi agar langkah-langkah kebijakan yang tepat dapat dirumuskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antara penduduk desa dan kota di Indonesia.



Gambar 1. Lineplot Perbandingan Kemiskinan Daerah Perkotaan dan Pedesaan 2021-2022

Gambar 1 memperlihatkan ketimpangan antara penduduk desa dan kota yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia, tercatat di provinsi Papua persentase rata-rata kemiskinan di pedesaan sangat tinggi hingga mencapai 35,82 persen. Sedangkan, di daerah perkotaan hanya menginjak angka 5,04 persen, artinya terjadi ketimpangan sekitar 30 persen antara penduduk pedesaan dan perkotaan di Papua. Kemudian pada provinsi Gorontalo, tercatat persentase kemiskinan penduduk pedesaan sebesar 24,45 persen. Sedangkan, di daerah perkotaan hanya menginjak 4,18 persen, artinya terjadi ketimpangan sekitar 20 persen antara penduduk pedesaan dan perkotaan di Gorontalo. Begitu pula di provinsi Maluku, tercatat persentase rata-rata kemiskinan penduduk pedesaan di Maluku mencapai 24,8 persen yang sangat jauh jika dibandingkan dengan persentase penduduk di perkotaan yang hanya menginjak angka 6 persen, artinya terjadi ketimpangan sekitar 18 persen antara penduduk perkotaan dan pedesaan di Maluku. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan.

Sedangkan, tercatat ada beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami ketimpangan cukup rendah. Tercatat di provinsi Bengkulu rata-rata kemiskinan di daerah pedesaan 14,81 persen dan di daerah perkotaan sebesar 14,57 persen, artinya hanya terjadi ketimpangan rata-rata kemiskinan sebesar 0,23 persen antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Kemudian provinsi Riau dengan rata-rata



kemiskinan di pedesaan sebesar 6,51 dan di perkotaan 7,21 persen, dengan artian bahwa hanya terjadi ketimpangan rata-rata kemiskinan sebesar 0,69 persen di provinsi Riau.

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan di sebagian besar provinsi. Ketimpangan ini menunjukkan adanya disparitas sosial dan ekonomi yang perlu ditangani oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks ini, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang tinggi di pedesaan. Hal ini meliputi aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang mempengaruhi akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas dasar lainnya. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, langkah-langkah kebijakan yang tepat dapat dirumuskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis, dan pengangguran. Kelompok miskin ini akan menimbulkan problema yang terus berlanjut bagi kemiskinan kultural dan struktural, bila tidak ditangani secara serius, terutama untuk generasi berikutnya.

2.2 Ketimpangan

Ketimpangan merupakan suatu kondisi dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara dua hal atau lebih. Konteks ketimpangan ini dapat dilibatkan dengan berbagai permasalahan yang sering terjadi di ruang lingkup kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi hingga pendidikan. Ketimpangan dalam masalah kemiskinan dapat terjadi disebabkan beberapa faktor seperti halnya ketimpangan pembangunan dan pendidikan. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai ketimpangan rata-rata kemiskinan di Indonesia. Jenis pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data survey. Variabel yang diselidiki pada studi ini, ialah variabel Rata-rata Desa yang dilihat dari variabel Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah Pedesaan 2021 Semester 1 (Maret), Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah Pedesaan 2021 Semester 2 (September), Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah Pedesaan 2022 Semester 1 (Maret), Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah Pedesaan 2022 Semester 2 (September), dan variabel Rata-rata Kota yang dilihat dari variabel Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan 2021 Semester 1 (Maret), Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan 2021 Semester 2 (September), Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan 2022 Semester 1 (Maret), Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan 2022 Semester 2

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis uji korelasi Pearson, dan uji T. Analisis deskriptif berdasarkan data sekunder, jurnal, artikel, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian analisis uji korelasi akan digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel Rata-rata Desa dan Rata-rata Kota dengan Rata-rata keseluruhan. Uji korelasi Pearson dapat mengungkapkan sejauh mana korelasi antara variabel tersebut, apakah ada hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian uji T digunakan untuk membandingkan Rata-rata Keseluruhan dengan Rata-rata Desa dan Rata-rata Kota. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara tingkat kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan. Uji T akan memberikan informasi apakah perbedaan yang diamati antara dua kelompok tersebut bersifat signifikan secara statistik ataukah hanya kebetulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Dalam tahap awal yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui beberapa informasi statistik yang ada dalam hasil olah data.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Perhitungan Statistika Sederhana

X	Mean	Std. Deviasi	Q1	Median	Q3
Rata-rata Kota	7,29	2,98	5	6,28	9,03
Rata-rata Desa	12,66	7,75	7,3	11,24	14,03
Rata-rata Keseluruhan	9,97	4,35	6,82	8,66	12,59

Berdasarkan hasil tabel di atas menampilkan variabel rata-rata desa dan rata-rata kota. Dimana hasil analisis deskriptif perbedaan mean (rata-rata) antara variabel rata-rata desa dan rata-rata kota cukup besar yaitu 5,37 persen, artinya rata-rata kemiskinan kota dan rata-rata kemiskinan desa terdapat ketimpangan cukup besar. Kemudian dari hasil analisis deskriptif juga ditampilkan Std. deviasi (standar deviasi) dari variabel rata-rata Kota, rata-rata Desa, dan rata-rata keseluruhan relatif rendah yaitu 2,98, 7,75 dan 4,35 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan yang relatif seragam atau homogen di antara unit analisis. Kemudian dari hasil analisis deskriptif juga ditampilkan kuartil 1, median, dan kuartil 3. Hal ini berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan hasil kuartil.

Tabel 3. Pemetaan Wilayah dengan Indikasi Kemiskinan

No	Provinsi	Rata-rata Keseluruhan	Kategori
1	ACEH	13,93125	Tinggi
2	SUMATERA UTARA	8,5325	Sedang
3	SUMATERA BARAT	6,1475	Rendah
4	RIAU	6,865	Sedang
5	JAMBI	8,5275	Sedang
6	SUMATERA SELATAN	12,245	Sedang
7	BENGKULU	14,69125	Tinggi
8	LAMPUNG	10,9875	Sedang
9	KEP. BANGKA BELITUNG	4,86875	Rendah
10	KEP. RIAU	8,13625	Sedang



11	DKI JAKARTA	4,6725	Rendah
12	JAWA BARAT	8,78	Sedang
13	JAWA TENGAH	11,285	Sedang
14	DI YOGYAKARTA	12,58875	Sedang
15	JAWA TIMUR	11,03625	Sedang
16	BANTEN	6,81875	Rendah
17	BALI	4,87125	Rendah
18	NUSA TENGGARA BARAT	13,86625	Tinggi
19	NUSA TENGGARA TIMUR	16,56	Tinggi
20	KALIMANTAN BARAT	6,4025	Rendah
21	KALIMANTAN TENGAH	5,18625	Rendah
22	KALIMANTAN SELATAN	4,605	Rendah
23	KALIMANTAN TIMUR	7,29625	Sedang
24	KALIMANTAN UTARA	7,43	Sedang
25	SULAWESI UTARA	7,655	Sedang
26	SULAWESI TENGAH	11,52875	Sedang
27	SULAWESI SELATAN	8,34375	Sedang
28	SULAWESI TENGGARA	10,54625	Sedang
29	GORONTALO	14,3175	Tinggi
30	SULAWESI BARAT	10,94125	Sedang
31	MALUKU	15,435	Tinggi
32	MALUKU UTARA	6,12625	Rendah
33	PAPUA BARAT	19,7475	Tinggi
34	PAPUA	20,43	Tinggi

Tabel 3 menunjukkan hasil setelah dilakukan pengelompokkan sesuai kuartil dari analisis deskriptif. Data yang masuk dalam kuartil 1 akan termasuk pada kelompok rendah dan yang berada diantara kuartil 1 dan kuartil 3 akan masuk dalam kelompok sedang, kemudian kuartil 3 akan masuk dalam kelompok tinggi.

4.2 Analisis uji korelasi

Setelah mendapatkan informasi statistik dari analisis deskriptif, tahap selanjutnya yaitu mencari nilai korelasi antara variable rata-rata kota dan rata-rata desa terhadap rata-rata keseluruhan, untuk mengetahui nilai korelasi atau hubungan antar variabel tersebut. kemudian kita cari nilai korelasi menggunakan analisis uji korelasi untuk mengetahui nilai korelasi antar variabel.

Tabel 4. Uji Korelasi Pearson

X	Rata-rata Keseluruhan
Rata-rata Kota	0,4707585
Rata-rata Desa	0,9407781

Tabel 4 menunjukkan nilai korelasi antara variabel Rata-rata Kota dan Rata-rata Keseluruhan, ditemukan bahwa korelasi antara kedua variabel tersebut cukup rendah, dengan nilai sekitar 0,47. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang lemah antara rata-rata kemiskinan di desa dengan rata-rata



kemiskinan secara keseluruhan. Selanjutnya, pada Tabel 4 juga terlihat nilai korelasi antara variabel Rata-rata Desa dan Rata-rata Keseluruhan, terdapat korelasi yang cukup tinggi antara kedua variabel tersebut, dengan nilai sekitar 0,94. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara rata-rata kemiskinan di kota dengan rata-rata kemiskinan secara keseluruhan. Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemiskinan desa merupakan sumbang nilai terbesar terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Trend masalah kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Wilayah pedesaan dengan perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan kemiskinan di Indonesia. Dari adanya masalah tersebut menjadikan langkah keputusan yang harus diambil dalam mengatasi permasalahan juga berbeda-beda yang perlu diadakan analisis statistik lagi secara mendalam dengan memperhatikan variabel penyebab atau faktor ketimpangan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan hasil proses hitung analisis deskriptif juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara persentase kemiskinan di pedesaan dengan perkotaan. Dengan adanya analisis deskriptif juga dapat disimpulkan beberapa wilayah provinsi yang termasuk dalam kluster kemiskinan rendah, sedang dan tinggi. Dal tersebut juga memudahkan untuk klasifikasi fokus penanganan permasalahan utama.

Berdasarkan hasil tersebut, maka sudah waktunya bagi pemerintah untuk melakukan *crash program* untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan kemiskinan antar wilayah di Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia dengan penelitian lanjutan mengenai faktor dan implikasi kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat.

Namun juga perlu diingat bahwa, apapun yang diprogramkan oleh pemerintah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan tidak akan terlaksana dan mencapai apa yang diharapkan, jika tidak didukung oleh masyarakat sebagai sasaran implementasi setiap kebijakan pembangunan dan kemasyarakatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada mata kuliah bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh UPN "Veteran" Jawa Timur sehingga artikel ini bisa ditulis dengan baik dan benar.

REFERENSI

1. Badan Pusat Statistik, (2022) Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022. Jakarta : BPS
2. Kadji, Yulianto. "Kemiskinan dan Konsep teoritisnya." Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG (2012): 1-7.
3. Kemiskinan (7 Februari 2023) Dalam Wikipedia, diakses pada tanggal 29 Mei 2023 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>.
4. Ramdani, Martiyan. "Determinan kemiskinan di Indonesia tahun 1982-2012." Economics Development Analysis Journal 4.1 (2015): 58-64.
5. Supriatna, Tjahya. Birokrasi, pemberdayaan, dan pengentasan kemiskinan. Humaniora Utama Press, 1997.
6. Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm.108-110.